

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Wulanggitang Tahun 2023–2026, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2026 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Kantor Camat Wulanggitang untuk 4 (empat) tahun yang akan datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Wulanggitang serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama tiga tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Wulanggitang Tahun 2023–2026 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Wulanggitang pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Wulanggitang di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Boru, Februari 2022

Camat Wulanggitang,

Drs. FREDYNANDUS MISENTI MOAT AENG

Pembina Tk. I

NIP.19683823 198903 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	24
3.2 Telahaan	30
3.3	
3.4	
3.5	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB VIII PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah maka Kecamatan Wulanggitang sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun kembali Rencana Strategis Tahun 2023-2026.

Sejalan dengan kondisi diatas kebijakan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen perencanaan pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024.

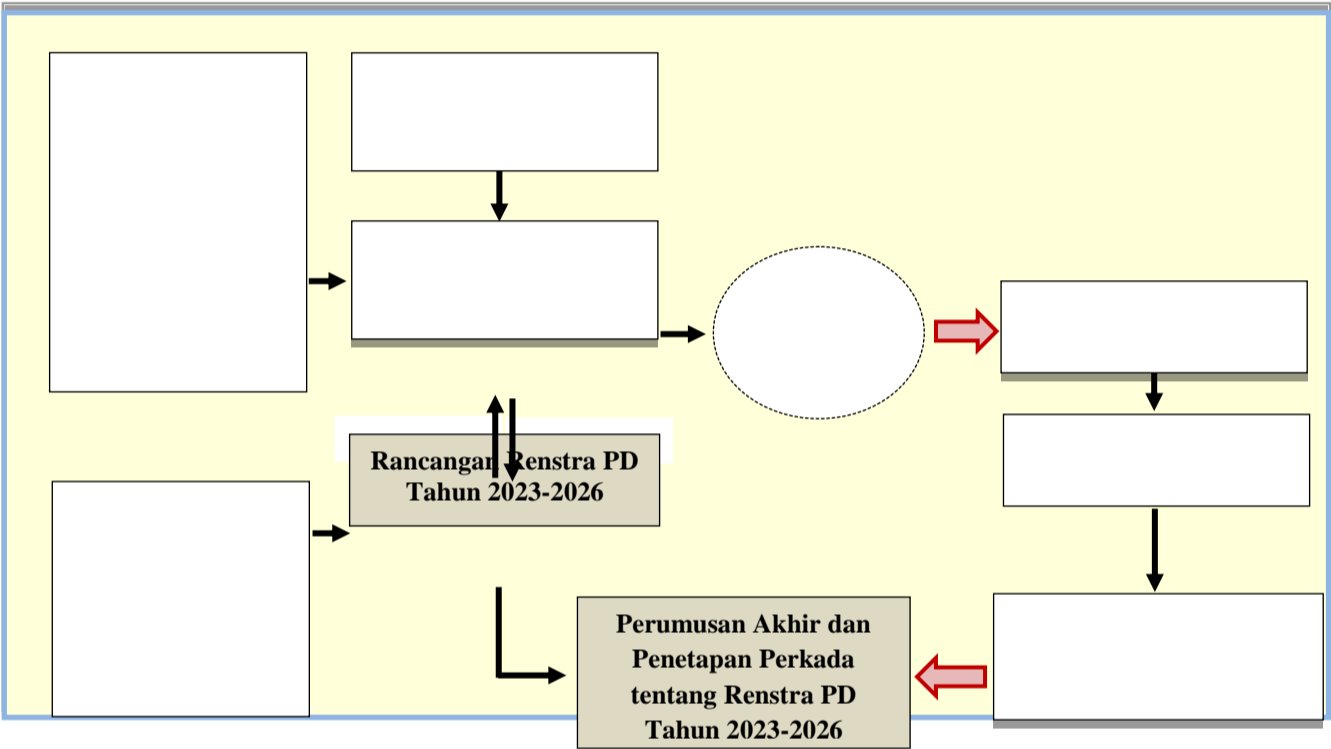
Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Wulanggitang menyusun Renstra Kecamatan Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Periode 2023-2026.

Rencana strategis Kantor Camat Wulanggitang merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2023-2026, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

akan dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan perangkat daerah.

Rangkaian proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kantor Camat Wulanggitang Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

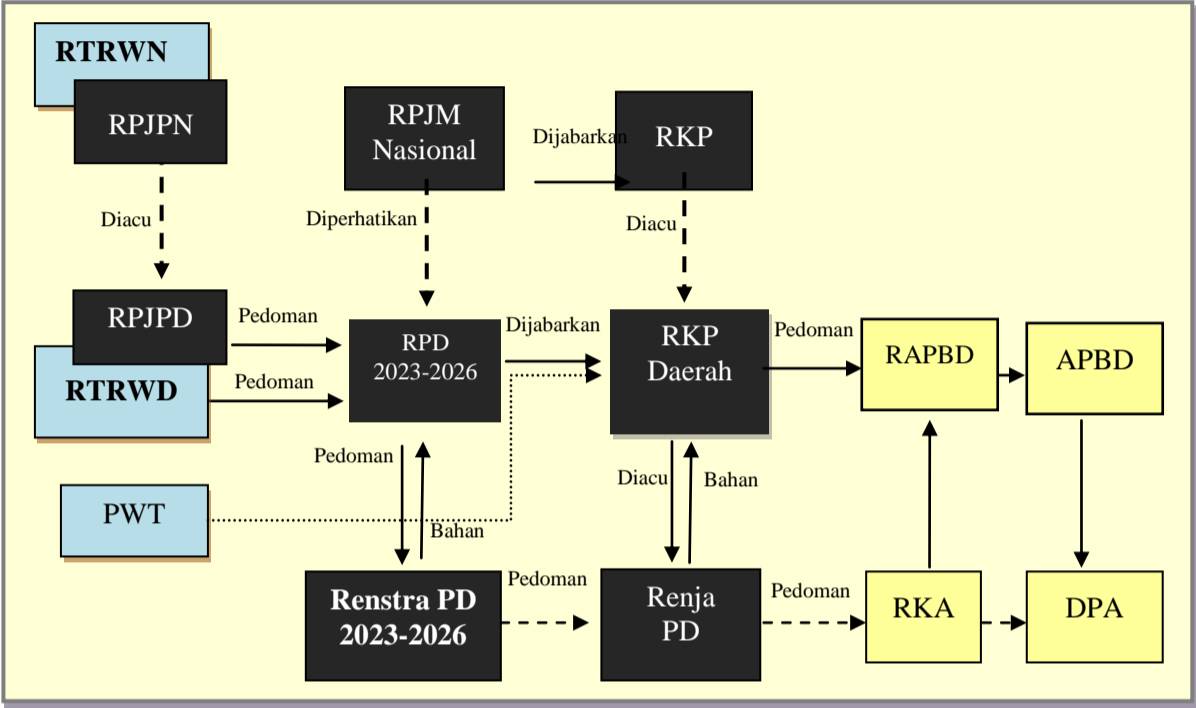
Gambar 1
Alur penyusunan Renstra PD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

selanjutnya Renstra PD Kecamatan Wulanggitang Tahun 2023-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis Kantor Camat Wulanggitang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya Kepmen 050-5889;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa jabatan Kepala daerah berakhir pada tahun 2022;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan
20. Peraturan Bupati Flores Timur No.... Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wulanggitang Tahun 2023-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Wulanggitang periode Tahun 2023-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021–2023 yang selanjutnya dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Wulanggitang Tahun 2023-2026 meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wulanggitang Tahun 2023-2026 adalah :

1. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Wulanggitang.
2. Menggambarkan kondisi umum Kecamatan Wulanggitang.
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah (Renja-PD) dan perencanaan penganggarannya.
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

5. Memudahkan seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dan pemangku kepentingan untuk memahami strategi dan arah kebijakan pembangunan Perangkat Daerah.

1.4.Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Wulanggitang Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT WULANGGITANG

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) Kantor Camat Wulanggitang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT WULANGGITANG

Bab ini menguraikan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Kantor Camat Wulanggitang beserta faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kantor Camat Wulanggitang Tahun 2023-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kantor Camat Wulanggitang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Kantor Camat Wulanggitang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Camat Wulanggitang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani Renstra sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Wulanggitang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT WULANGGITANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Camat Wulanggitang

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan Pasal 5 disebutkan bahwa kecamatan merupakan bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a) Camat;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial; dan
- g) Seksi Perekonomian.

2.1.1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- e. Pengelolaan administrasi kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. Penyusunan Program dan Anggaran;
- c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7. Seksi Perekonomian

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;

- c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.8. SubBagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah serta urusan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penatausahaan Administrasi Perkantoran;
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
- c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.9. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

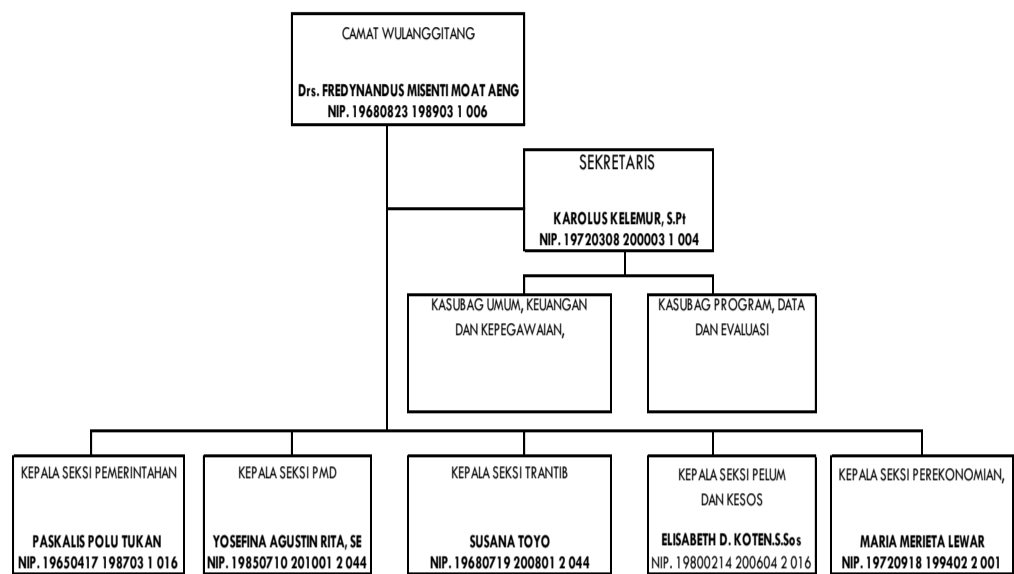
Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan Program, Data dan Evaluasi Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
- b perencanaan program, data dan evaluasi;
- c pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
- d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Wulanggintang berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Bagan 1 : Struktur Organisasi Kantor Camat Wulanggintang



2.2.Sumber Daya Kantor Camat Wulanggintang

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan baik barang dan jasa. Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Camat Wulanggintang sampai dengan Bulan Desember 2021 adalah sebanyak 20 orang dengan komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	
2	Sekertaris Kecamatan	1	
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	
4	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	
6	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	
7	Kepala Seksi Perekonomian	1	
8	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan		Lowong

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
	Kepegawaian		
9	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi		Lowong
10	Analisis Desa dan Kelurahan pada Seksi Pemerintahan		Lowong
11	Pengadministrasian Kependudukan pada Seksi Pemerintahan	2	
12	Analisis Forum Kerukunan Umat pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Lowong
13	Analisis Keamanan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Lowong
14	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	
15	Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat		Lowong
16	Analisis Perencanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat		Lowong
17	Verifikator Anggaran pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	
18	Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum		Lowong
19	Analisis Layanan Umum pada Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum		Lowong
20	Analisis Perekonomian pada Seksi Perekonomian		Lowong
21	Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	1	Pindah Tugas
22	Pengadministrasian Persuratan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
23	Teknisi Listrik dan Jaringan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
24	Pengemudi pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
25	Petugas Keamanan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	2	
26	Bendahara pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	3	

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
27	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
28	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi		Lowong
29	Pengolah Data pada Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	2	
30	Menjadi Kepala Desa		
Jumlah		19	

Tabel 2.2

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	Pembina Tk. I	(IV / b)	1	
2	Pembina	(IV / a)	1	
3	Penata Tk. I	(III / d)	4	
4	Penata	(III / c)		
5	Penata Muda Tk. I	(III / b)	3	
6	Penata Muda	(III / a)	2	
7	Pengatur Tk. I	(II / d)	4	
8	Pengatur	(II / c)	2	
9	Pengatur Muda Tk. I	(II / b)		
10	Pengatur Muda	(II / a)	1	
11	Juru Tk. I	(I / d)		
12	Juru	(I / c)		
13	Juru Muda Tk. I	(I / b)	1	
14	Juru Muda	(I / a)		
Jumlah			19	

Tabel 2.3

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
----	--------------------	----------------	------------

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	S2	0	
2	S1	4	
3	DIII	2	
4	SMA	12	
5	SMP		
6	SD	1	
Jumlah		19	

b. Aset-Aset

Selain sumber daya aparatur sipil negara, sumber daya lain yang dimiliki oleh Kantor Camat Wulanggitang adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Peralatan atau Sarana Prasarana Pendukung yang dimiliki

No	Jenis Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
01	Tanah Bangunan	1	Baik
	Perumahan/G.Tempat Tinggal		
	Lainnya		
02	Tanah Bangunan Perumahan /G. Tempat Tinggal Lainnya	1	Baik
03	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
04	Tanah Usaha	1	Baik
05	Tanah Lapangan Sepak Bola	1	Baik
06	Meja ½ Biro	5	Baik
07	Laptop Toshiba	1	Rusak
08	Laptop Toshiba	2	Baik
09	Sofa	1	Baik
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
11	Genset	1	Baik
12	P. C. Unit	1	Baik
13	Meja ½ Biro	6	Rusak Berat
14	Alat Dapur lainnya	27	Baik
15	Sepeda Motor		

No	Jenis Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
	- Supra x 125	3	Baik
	- Versa	1	Baik
	- Mega Pro	1	Baik
	- Honda CBR	1	Baik
16	Televisi	3	Baik
17	Lemari Kayu	4	Baik
18	Kursi kayu	7	Baik
19	Meja Makan Kayu	1	Baik
20	Mesin Potong Rumput	1	Rusak Berta
	Tempat Tidur Besi	1	Baik
	Kasur/Spring Bed	1	Baik
	Mesin Cuci	1	Baik
	Laoundspeaker	5	Baik
	Meja Kerja pejabat Eselon IV	4	Baik
	Printer	6	2 Baik 4 Rusak
	Rak Piring Aluminium	1	Baik
	Dispenser	1	Baik
	Meja Panjang	3	Baik
	Komputer P.C.	1	Baik
	Amplifier	1	Baik
	Equalizer	1	Baik
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Rusak Ringan
	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	Baik
	Bagunan Gedung Kantor Lain – Lain (Bangunan WC Kantor)	1	Baik

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dikuasai Kantor Camat Wulanggitang terdiri dari : Aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Total Aset Tetap Kabupaten Flores Timur yang dikuasai oleh Kantor Camat Wulanggitang sebesar : Rp. 2.742.818.500,0

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Wulanggitang

Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Wulanggitang terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

- 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
- 3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan
- 4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja
- 5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan
- 6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat
- 7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan

Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1

Capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Tahun 2023 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
		Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7		9	10	11	12		14	15	16	17	
1	Prosentase tersedianya administrasi per- kantoran	10 0%	10 0 %	10 0 %	10 0 %		85 %	85 %	85 %	85 %		85 %	85 %	85 %	85 %	
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	10 0%	10 0 %	10 0 %	10 0 %		80 %	80 %	80 %	80 %		80 %	80 %	80 %	80 %	
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %		85 %	85 %	85 %	85 %		90 %	90 %	90 %	90 %	
4	Prosentase tersedianya sarana pendukungguna peningkatan SDM dan hasil kegiatan	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %		80 %	80 %	80 %	80 %		85 %	85 %	85 %	85 %	
5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %		85 %	85 %	85 %	85 %		90 %	90 %	90 %	90 %	

	kepada masyarakat															
6	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	100%	100%	100%	100%		85%	85%	85%	85%		85%	85%	85%	85%	

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat DaerahKecamatan Wulanggitang dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KANTOR CAMAT WULANGGITANG															
KABUPATEN FLORES TIMUR															
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan		
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(12)	(13)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
Penyediaan Jasa Surat	900.000	1.025.000	990.000	810.000	900.000	1.020.000	990.000	810.000	100,00%	99,51%	100,00%	100,00%	-2,57%	-2,60%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	8.514.000	10.114.000	9.500.000	9.495.500	8.425.500	10.106.000	9.500.000	8.871.000	98,96%	99,92%	100,00%	93,42%	4,22%	2,44%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	973.500	2.250.000	2.250.000	11.684.875	946.000	1.292.500	1.670.300	11.016.350	97,18%	57,44%	74,24%	94,28%	183,48%	208,47%	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	17.510.000	17.400.000	26.400.000	24.840.000	17.510.000	17.400.000	26.400.000	24.840	100,00%	100,00%	100,00%	0,10%	15,06%	-16,27%	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.593.500	5.710.500	3.186.500	1.091.000	3.587.500	5.710.500	3.186.500	1.091.000	99,83%	100,00%	100,00%	100,00%	-17,02%	-16,93%	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.693.000	26.566.500	20.261.600	7.453.000	20.667.000	26.539.500	20.258.000	7.452.500	99,87%	99,90%	99,98%	99,99%	-19,52%	-19,49%	
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	10.100.000	10.700.000	7.548.400	11.250.000	10.100.000	10.700.000	7.544.800	11.214.000	100,00%	100,00%	99,95%	99,68%	8,51%	8,36%	
Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	3.750.000	3.774.000	3.401.390	2.198.375	3.750.000	3.765.500	3.401.000	2.194.600	100,00%	99,77%	99,99%	99,83%	-14,87%	-14,91%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
Penyediaan Makanan dan Minuman	14.514.000	15.937.500	11.937.500	12.600.000	13.785.000	15.932.000	11.937.000	12.128.000	94,98%	99,97%	100,00%	96,25%	-3,25%	-2,63%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	112.200.000	129.175.000	76.935.000	31.300.000	112.032.500	126.350.700	75.872.500	31.220.000	99,85%	97,81%	98,62%	99,74%	-28,21%	-28,67%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Teknis Perkantoran	124.310.000	110.400.000	96.710.000	69.000.000	124.310.000	110.400.000	96.710.000	68.100.000	100,00%	100,00%	100,00%	98,70%	-17,41%	-17,72%	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.970.000	9.175.000	7.475.000	0	6.904.000	9.174.000	7.473.000	0	99,05%	99,99%	99,97%	#DIV/0!	-28,96%	-28,55%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0	5.785.000	9.180.000	0	0	5.780.000	9.155.000	#DIV/0!	#DIV/0!	99,91%	99,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	5.000.000	6.160.700	5.660.700	0	5.000.000	6.159.500	5.652.500	0	100,00%	99,98%	99,86%	#DIV/0!	-28,30%	-28,35%	
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	20.235.000	20.523.000	8.700.000	0	20.191.000	20.523.000	8.700.000	0	99,78%	100,00%	100,00%	#DIV/0!	-52,06%	-51,99%	
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan															
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0	19.475.000	22.000.000	0	0	0	21.901.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	99,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat															
Pendampingan dan Fasilitas Keuangan Desa	28.013.000	0	29.363.000	26.724.900	27.778.000	0	29.318.000	26.204.400	99,16%	#DIV/0!	99,85%	98,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	8.950.000	8.950.000	13.250.000	15.736.000	8.950.000	8.950.000	13.250.000	15.436.000	100,00%	100,00%	100,00%	98,09%	22,27%	21,51%	
Fasilitasi dan koordinasi pelayanan kemasyarakatan	18.000.000	18.000.000	56.400.000	105.390.000	18.000.000	18.000.000	52.400.500	103.445.000	100,00%	100,00%	92,91%	98,15%	100,07%	96,18%	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)															
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	0	0	0	11.000.000	27.778.000	0	29.318.000	11.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan *Good*

Governance and Clean Government menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran/pembukuan, dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
8. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
9. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
10. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;

6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD II Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjang tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Wulanggitang, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya,

antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
PemetaanPermasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok <i>Tujuan</i>	Masalah <i>Strategi</i>	Akar Masalah <i>Arah kebijakan</i>
1.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah yang belum maksimal.
			Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
		Rendahnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan	Penyusunan dokumen perencanaan yang belum berkualitas (target dan sasaran tidak jelas, tidak terukur, tidak partisipatif serta tidak tepat waktu.
		Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Penataan Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa yang belum maksimal
			Kurangnya kualitas SDM Aparatur Desa

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Wulanggitang

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang digunak an	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasarana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerintahan di desa yang baik	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal
Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.	Belum optimal dan sinergis	Optimal dan sinergis	Profesionalitas aparatur dan jalinan kerjasama yang dibangun	dukungan dan sinergitas pelaksanaan program	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang belum optimal dan sinergis.
Tingkat Partisipasi	Rendah	Tinggi	Kehandalan aparatur	Globalisasi dan teknologi	Tingkat Partisipasi

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
			kecamatan dalam meningkatkan partisipasi		masyarakat yang masih rendah
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Berkurang	Tinggi	semangat anti KKN yang dimiliki aparat	Tindakan penegakkan hukum terhadap pelaku KKN yang memberi efek jera bagi para pelakunya	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran	Belum optimal	Optimal, cepat dan tepat sasaran	Ketersediaan aparat dan sarana prasarana pendukung,SO P dan tanpa KKN	Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan	Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran yang belum optimal
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Belum optimal	Optimal dan kesejahteraan meningkat	Kewenangan Kecamatan dan merencanakan dan mengelola program pemberdayaan ekonomi serta	program pemberdayaan yang menyetuh masalah dan kebutuhan masyarakat serta pendanaan dan pendampingan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan tidak disertai dengan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah
Income	Rendah	Tinggi	Pendampingan	Pemanfaatan	Income

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
perkapita masyarakat			dan kemampuan mengelola potensi yang dimiliki	potensi dan pengolahan serta pemasaran produksi	perkapita masyarakat yang masih rendah
Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;	Belum optimal	Demokratis dan etis	Ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi baik formal maupun informal	etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengabaian etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pem.
Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat	Rendah	Tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparatur yang cukup memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat yang masih rendah
Derajat Kesehatan masyarakat	Rendah	Tinggi	Perhatian dan minat aparatur yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	ketetersediaan dan perhatian para aparatur medis dan paramedis serta ketersediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan	Tinggi	Rendah	Adanya perhatian yang	Angka ketergatalungan,	Masih tingginya

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
pengangguran			serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	angka kemiskinan dan pengangguran serta terbatasnya pendanaan program penanggulangiannya

Tabel 3.3

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalinnya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan	Good governance dan clean goverment menjadi isu yang terus digulirkan dan	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah	

	pembangunan	meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan serta pemberlakuan e-KTP	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur tidak mengacu pada Renstra K/L dan Provinsi, sehingga dalam Renstra kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur tidak dilakukan penelaahan Renstra K/L dan Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang diwilayah Kabupaten Flores Timur tidakmemberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan fungsi Kecamatan Wualnggitang Kabupaten Flores Timur.Dengan demikian, dalam penyusunan Renstra ini, tidak dilakukan penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah.

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu Kantor Camat Wulanggitang perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya *Controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis..

3.1.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Tabel 3.4

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan	Kelemahan
1. Uraian tugas yang jelas	1. Ketersediaan SDM yang minim dan tidak didukung dengan adanya kompetensi yang memadai
2. Adanya pedoman dan juknis	berimplikasi pada ketidakseimbangan beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja;
3. Kesadaran akan tupoksi masing-masing	2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan.
4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Fasilitas Penunjang (Peralatan/Perlengkapan), Dukungan Finansial : Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur, Tugas Pembantuan dan dukungan dana NGO Internasional (khususnya dalam mengembangkan potensi), yang cukup memadai.	3. Sarana prasarana kantor kurang memadai
5. Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung, antara lain : Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada	4. Tingkat kesejahteraan aparatur masih belum memenuhi standar ditandai dengan motivasi kerja kurang (naik-turun).
	5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan

Kekuatan	Kelemahan
<p>camat.</p> <p>6. Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, , Tokoh Agama dan komponen masyarakat.</p>	<p>dalam memberikan pelayanan publik.</p> <p>6. Belum adanya (diberlakukannya) rewards maupun punishment terhadap aparatur kecamatan maupun aparatur Kelurahan dan Desa yang melakukan pelanggaran;</p> <p>7. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah atas maupun pemerintah Kelurahan dan Desa dalam memberikan pelayanan;</p> <p>8. Pelimpahan wewenang kepada Camat yang belum optimal;</p> <p>9. Perilaku masyarakat belum mendukung program</p>

Peluang	Tantangan
<p>1. UU No. 23 Th. 2014 dan perubahannya.</p> <p>2. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan di kecamatan.</p> <p>3. Adanya program utama “Gerbang Emas, Anggur Merah”</p> <p>4. Adanya bimtek/diklat/sosialisasi peraturan yang diadakan pemkab</p> <p>5. Kemajuan teknologi.</p> <p>6. Adanya perhatian pemerintah pusat sampai kabupaten terhadap Pembangunan di desa</p>	<p>1. Kapasitas aparatur desa yang masih rendah</p> <p>2. Potensi SDA yang belum tergali.</p> <p>3. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar.</p> <p>4. Masih tingginya keluarga miskin dan tingkat pengangguran usia muda.</p> <p>5. Berada pada jalur kota kabupaten sehingga rawan kamtibmas.</p> <p>6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana pembangunan (program</p>

Peluang	Tantangan
<p>dan Daerah Tertinggal/Daerah maupun progran dari dana Tugas Pembantuan lainnya).</p> <p>7. Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah RI dengan Negara Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia maupun penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki.</p> <p>8. Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.</p> <p>9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.</p>	<p>dan kegiatan) dan pelayanan publik;</p> <p>7. Daya beli yang rendah dan biaya pembangunan, pelayanan publik harga pasar yang tinggi</p>

3.1.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupak kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabilah tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang besar, dan sebaliknya suatu kondisi / peluang yang apabilah dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Isu strategis Kecamatan Wulanggitang dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, yang sinergi dengan isu global, nasional dan daerah sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Dengan memperhatikan kondisi tersebut isu strategis Kecamatan Wulanggitang adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik;
4. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalani kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan;
6. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan di Kecamatan Wulanggitang;
7. Peningkatan destinasi dan daya Tarik wisata;
8. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
9. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
10. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;

Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan

kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah tersebut dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi serta memperhatikan kondisi factual, permasalahan dan isu – isu strategis maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kecamatan Wulanggitang Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Pelayanan SKPD
Kantor Camat Wulanggitang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Cakupan Desa yang Tertib dalam tata kelola Administrasi Desa	85%	90%	95%	100 %	100 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Tahap berikutnya berdasarkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) sebelumnya dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Wulanggintang dan karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi kecamatan Wulanggintang, strategi yang sesuai adalah strategi agresive; artinya pihak kecamatan harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
 - 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur NTT dan Bupati Flores Timur.
 - 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.
 - 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.
 - 4) Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa serta melakukan rewards dan punishment.
 - 5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, , Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalin kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
 - 6) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
 - 1) Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
 - 2) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)
 - 1) Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah

- 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bimtek yang ada
 - 4) Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
- 1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
 - 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan public	Penerapan SOP sesuai Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa • Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Camat Wulanggitang.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 maka Kantor Camat Wulanggitang akan menjalankan 4 (empat) program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Camat Wulanggitang dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026. Kantor Camat Wulanggitang sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan lingkup kecamatan, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Camat Wulanggitang tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat antara lain tujuan dan sasaran SKPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Kantor Camat Wulanggitang merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Camat Wulanggitang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kantor Camat Wulanggitang sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Kantor Camat Wulanggitang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kantor Camat Wulanggitang setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kantor Camat Wulanggitang yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Kantor Camat Wulanggitang).

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kantor Camat Wulanggitang Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja Kantor Camat Wulanggitang.

Boru, Pebruari 2022

Camat Wulanggitang,

Drs. Fredynandus Misenti Moat Aeng

Pembina Tingkat I

Nip. 19680823 198903 1 006

INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT WULANGGITANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
KANTOR CAMAT WULANGGITANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
		7 01	KECAMATAN										
		7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100 %								
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100 %								
				Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100 %								
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100 %								
		7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	52 Dokumen			
		7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
		7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100 %	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	24 Laporan		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	16 Laporan			
		7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
		7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	100 %	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	156 Orang/Bulan		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	116 Dokumen		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang gungja wab (17)	Lokasi (18)
						2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(16)		
		7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
		7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Lap)		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			
		7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
		7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasrakan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasrkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		2 Orang	2 orang	2 orang				Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100 %							Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
		7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
		7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket		Kantor Camat Wulang gitang	Wotan Ulumado
		7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	100 %	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	Laporan		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100 %	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	25 Laporan		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
		7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
		7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	100 %	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100 %	Unit	4 Unit	4 Unit	Unit	Unit		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100 %	Unit	4 Unit	3 Unit	Unit	Unit		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset tak berwujud yang disediakan		Unit							
		7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100 %	Unit	4 Unit	4 Unit	Unit	Unit		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang gungja wab	Lokasi
						2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
		7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100 %	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Laporan		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100 %	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang gungja wab	Lokasi
						2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
		7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	100 %	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Unit		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin lainnya yang dipelihara		Unit	Unit	Unit	Unit				
		7 01 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset tak berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara		Unit							
		7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	Unit		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100 %	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7	UNSUR KEWILAYAHAN										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang gungja wab (17)	Lokasi (18)
						2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(16)		
		7 01	KECAMATAN										
		7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
		7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan										
		7 01 02 2.02 02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	1 Laporan		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
		7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan										
		7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	100 %	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
		7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai										
		7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen		Kantor Camat Wulanggitang	Kantor Camat Wulanggitang
		7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN										
		7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
		7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	100 %	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	Dokumen		Kantor Camat Wulanggitang	Kantor Camat Wulanggitang
		7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen		Kantor Camat Wulanggitang	Kantor Camat Wulanggitang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
		7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	100 %	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	Dokumen		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang
		7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen		Kantor Camat Wulang gitang	Kantor Camat Wulang gitang